



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	4 Desember 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	3	Article Size
Journalist	Fitri Sartina Dewi	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

1 MENGAJIAN DANA SUBSIDI BBM

Infrastruktur Jalan & Lahan Tol Serap Rp11 Triliun

JAKARTA—Pemerintah memastikan akan mengalokasikan Rp11 triliun dari dana pengalihan subsidi BBM untuk infrastruktur jalan pada 2015, termasuk untuk pembebasan lahan jalan tol sepanjang 1.500 km.

Fitri Sartina Dewi
fitri.sartina@bisnis.co.id

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah sebelumnya telah mengajukan usulan penambahan anggaran infrastruktur di Kementerian PU-Pera sebesar Rp42 triliun.

"Dari total Rp42 triliun, yang sudah diketahui detail penggunaannya adalah Rp23 triliun," katanya, Rabu (3/12).

Dia menjelaskan dari total anggaran Rp23 triliun itu, pemerintah telah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi pengembangan air bersih, penanganan kawasan kumuh, pengadaan akses sanitasi layak dan irigasi. Adapun, sisa dana Rp11 triliun akan digunakan untuk infrastruktur jalan.

"Perincian penggunaan anggarannya sudah ada, tetapi ini masih sementara karena menunggu

► Perincian penggunaan anggaran infrastruktur sudah ada tetapi butuh persetujuan dan pembahasan APBN-P 2015.

► Pemerintah akan mulai melakukan pembebasan lahan sejumlah ruas jalan tol terutama jalan tol Trans-Sumatra pada 2015.

persetujuan dan pembahasan APBN-P 2015," ujarnya.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera Djoko Murjanto mengatakan dana Rp11 triliun itu rencananya digunakan untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan baru, serta perbaikan atau peningkatan jalan dan jembatan yang sudah terbangun.

"Dana ini akan digunakan untuk program pembangunan dan peningkatan jalan yang menjadi prioritas pemerintah," tuturnya.

Dengan adanya rencana penambahan anggaran Rp11 triliun untuk infrastruktur jalan, ucapnya, pengerjaan sejumlah program yang sempat tertunda pengerjaannya pada tahun ini diharapkan bisa segera dilaksanakan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan progres kemandapan jalan hingga 98% hingga pada 2015.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengalokasikan sebagian dana tambahan tersebut untuk mendanai pembebasan lahan pada sejumlah ruas tol. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian PU-Pera untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km hingga 2019.

INGIN 1.500 KM

Meskipun Presiden hanya menginstruksikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, Kementerian PU-Pera berupaya

Program Pembangunan Jalan 2015-2019

Pembangunan Jalan Tol	: 1.500 km
Pembangunan Jalan Nasional	: 2.350 km
Peningkatan dan Perbaikan Jalan	: 2.700 km
Perbaikan dan Peningkatan Jembatan	: 19 km
Pembangunan Jalan Layang (fly over)	: 14,6 km
Pembangunan Jembatan Baru	: 11,4 km

Sumber: Ditjen Bina Marga Kementerian PU-Pera, diolah



BISNIS/HUSIN PARAPAT

melampaui target tersebut dan berencana untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.500 km selama lima tahun mendatang.

"Untuk mencapai target itu, kami harus bisa mempercepat proses pembebasan lahannya," tuturnya.

Namun, untuk mempercepat proses pembebasan lahan pada sejumlah ruas tol, dibutuhkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah.

Menurutnya, perhitungan dana untuk pembebasan lahan itu masih bersifat sementara karena nilainya bisa berkurang atau bertambah tergantung dengan lamanya waktu pembebasan lahan.

Pemerintah, lanjutnya, telah mengalokasikan Rp2 triliun dalam APBN 2015 untuk membiayai pembebasan lahan pada sejumlah ruas tol. Dengan demikian, pemerintah masih butuh sekitar Rp5 triliun untuk menutupi kekurangan biaya pembebasan lahan.

"Dari total usulan penambahan anggaran Rp11 triliun itu akan kami manfaatkan juga untuk membiayai pembebasan lahan jalan tol," ucapnya.

Namun, dia belum dapat menyebutkan berapa jumlah dana yang akan dimanfaatkan untuk pembebasan lahan jalan

tol. Meski demikian, dia memastikan sebagian besar dana pengalihan subsidi BBM itu akan tetap digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional sepanjang 38.500 km.

Pada tahun depan, sambungnya, pemerintah akan mulai melakukan pembebasan lahan sejumlah ruas tol, khususnya untuk jalan tol Trans-Sumatra yang diprioritaskan pembangunannya oleh Presiden.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian pembebasan lahan pada sejumlah ruas tol yang sempat terbengkalai pembangunannya karena terkendala masalah lahan.

"Kami akan gunakan peraturan baru yaitu UU No.2/2012 untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Dalam waktu 1—2 tahun prosesnya diharapkan bisa selesai," tuturnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPTT) Kementerian PU-Pera Achmad Gani Ghazaly mengatakan jalan tol 1.500 km itu meliputi tol Trans-Jawa, Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan enam ruas tol dalam kota Jakarta.

Dia mengatakan dari total panjang jalan 1.500 km yang ditargetkan selesai pada 2019, ruas Bakauheni—Terbanggi Besar—Palembang merupakan ruas yang terpanjang yaitu 550 km. □